

Intani Dorong Provinsi Banten Jadi Produsen Pangan Nasional

JAKARTA (IM) - Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) mendorong Provinsi Banten membangun kemandirian pangan untuk memenuhi kebutuhan daerah serta menjadi produsen pangan nasional. Ketua Umum Intani Guntur Subagia mengungkapkan, potensi wilayah Banten sangat besar di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Namun, potensi-potensi itu belum dikembangkan optimal.

"Saatnya Banten menjadi produsen pertanian, peternakan dan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan menjadi penyuplai komoditas ke Ibu Kota Jakarta dan daerah lainnya," ujar Guntur melalui keterangan tertulis di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (12/4).

Ia mengatakan, saat ini DKI Jakarta mengimpor beras dari Sulawesi. Semestinya Banten yang mampu memenuhi kebutuhan itu karena lokasinya menempel dengan Jakarta. Oleh karena itu, menurut Guntur, untuk mendorong Banten menjadi produsen pangan nasional, Intani siap melakukan kolaborasi dengan pemerintah

daerah, organisasi, dan korporasi dalam pemberdayaan masyarakat, mengembangkan teknologi pertanian, melahirkan inovasi-inovasi produk, membangun petani muda, dan mengembangkan bisnis sosial pertanian (social enterprise).

"Intani harus membangun piloting program di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dijadikan model dan diduplikasi di berbagai daerah," katanya saat Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Banten, di Lebak, Banten.

Sementara itu, Ketua DPW Intani Banten Sulaiman Effendi mengajak masyarakat untuk produktif mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Ia menambahkan, kepengurusan baru DPW dan DPD Intani di wilayah Banten, diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan Banten, yang sebagian daerahnya masih dikategorikan miskin, tertinggal dan masyarakatnya berpendapatan rendah. ● yy

Pemkab Bogor Ajak Pemuda Kolaborasi Bangun Desa

CIBINONG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat mengajak kaum muda untuk berkolaborasi membangun desa agar terciptanya percepatan pembangunan infrastruktur di setiap desa.

"Pembangunan harus kolaboratif, dikarenakan Kabupaten Bogor secara demografis lebih banyak pedesaannya maka diharapkan Karang Taruna di desa menjadi lokomotif dan percepatan pembangunan," ungkap Komite Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor Saepudin Muhtar alias Gus Udin di Bojoggede, Bogor, Minggu (11/4).

Dia mengemukakan para pemuda perlu terlibat aktif membantu pemerintah dalam perbaikan maupun pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Pasalnya, tahun ini Pemkab Bogor memiliki program padat karya yang melibatkan masyarakat desa melalui bantuan keuangan bernama Satu Miliar

Satu Desa atau Samisade.

Bupati Bogor Ade Yasin menerangkan, program Samisade selain untuk menata infrastruktur desa, juga memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19. "Saat ini masih pandemi Covid-19, dibanding kami berikan bansos, lebih baik berikan pekerjaan kepada masyarakat," ungkap Ade.

Dia mengatakan bantuan dengan total Rp311,8 miliar untuk 349 desa yang mengajukan itu akan diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur desa melibatkan warga secara padat karya dengan konsep sebagai pengguna anggaran.

Ia menguak tak ingin sembarangan memberikan bantuan keuangan tersebut, karena khawatir ada penyelewengan anggaran di kemudian hari sehingga kepala desa berurusan dengan hukum. "Kami ingin desa memanfaatkan bantuan ini dengan baik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Karena bantuan ini akan ada tiap tahun," ujarnya. ● pur

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

SIDAK PASAR TRADISIONAL

Petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor berdialog dengan pedagang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (12/4). Sidak tersebut bertujuan untuk memantau harga dan ketersediaan sembako dan beberapa komoditi strategis lainnya jelang memasuki bulan suci Ramadhan.

DPRD Jabar Sebut Lima Persoalan Pemprov pada Musrenbang 2022

"Kelima masalah tersebut bukan tanpa dasar, saya yakin Bapak Gubernur Jawa Barat selaku pimpinan eksekutif telah benar-benar memahami persoalan Jawa Barat hingga bisa mengatasi persoalan yang kita hadapi ini," ujar Taufik Hidayat.

BANDUNG (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkap lima persoalan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat.

"Merunut pada masalah pokok pembangunan di Jawa Barat sebagaimana disampaikan di RPJMD bahwa kita ma-

sih dihadapkan pada sejumlah persoalan," kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah RKPDP Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, di Kota Bandung, seperti dilansir dari Antara, Senin (12/4).

Pertama, adalah masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial serta keamanan. Kedua, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketiga, masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur. Keem-

pat, pertumbuhan ekonomi yang mengalami pelambatan. Kelima, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

"Kelima masalah tersebut bukan tanpa dasar, saya yakin Bapak Gubernur Jawa Barat selaku pimpinan eksekutif telah benar-benar memahami persoalan Jawa Barat hingga bisa mengatasi persoalan yang kita hadapi ini," ujarnya.

"Dan ini sejalan dengan fokus pembangunan industri pariwisata ketahanan pangan, UMKM infrastruktur transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi pen-

didikan reformasi sosial dan keterampilan," lanjut Taufik.

Ia mengatakan, DPRD Jawa Barat, menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan musrenbang di tengah pandemi Covid-19 ini. "Tentu kami apresiasi pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan secara virtual ini, melihat belum berakhirnya pandemi Covid-19," kata Taufik.

Oleh karena itu, kata Taufik, dapat dipastikan bahwa upaya pemulihan atau 'recovery' ekonomi akan menjadi sebagai salah satu prioritas pembangunan Jawa Barat kedepannya. ● yan

Ridwan Kamil: Jabar Bergerak Bisa Mencakup Wilayah Lebih Luas

BANDUNG (IM) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menilai organisasi kemanusiaan Jabar Bergerak sudah saatnya menyebar kebaikan untuk cakupan yang lebih luas. Sebab menurutnya, kemanusiaan tidak dibatasi wilayah administrasi. Maka tak menutup kemungkinan Jabar Bergerak bisa berubah menjadi Indonesia Bergerak.

"Kalau di Jabarnya sudah luar biasa maka sudah saatnya menyebar kebaikan ke level yang lebih tinggi karena kemanusiaan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Saya melihat bisa, dari Jabar bergerak menjadi Indonesia bergerak," katanya saat memberikan arahan pada Rakerda Jabar Bergerak, di Ballroom Hotel Grand Preanger Bandung, Minggu (11/4).

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil melihat, sejauh ini Jabar Bergerak yang kini memiliki lebih dari seribu relawan telah banyak membantu masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya menolong korban bencana alam, organisasi yang berdiri 2019 menjadi mitra pemerintah mengurus bidang pendidikan, sosial, lingkungan, kesehatan hingga budaya.

"Organisasi ini bergerak-nya itu di dunia yang mengubah nasib, seperti menolong yang masih miskin supaya sejahtera, yang hidupnya susah supaya senang supaya pintar.

Itulah esensi dari Jabar Bergerak dan saya sudah melihatnya sejauh ini," tuturnya.

Tak hanya itu, organisasi yang didirikan Atalia Praratya telah memperlihatkan kemandirian. Tanpa sokongan dana APBD sedikit pun, Jabar Bergerak mampu menjadi organisasi besar yang tersebar di 27 kabupaten/ kota di Jabar. "Jabar Bergerak tidak saya kasih anggaran sedikitpun tapi bisa menunjukkan kemandiriannya bahkan ternyata bisa sebesar ini," ungkap Kang Emil.

Agar bisa berumur panjang, Kang Emil meminta Jabar Bergerak agar melakukan regenerasi dalam tubuh organisasi dan memperbanyak jumlah anggota. "Semangat regenerasi dan keikhlasan dalam menolok kemanusiaan, itulah yang saya titipkan ke para pengurus," katanya.

Selain regenerasi, kunci organisasi mampu bertahan yaitu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kang Emil meyakini, apabila kepengurusannya masih menggunakan pola pikir lama maka setelah Covid-19 organisasi ini akan tertinggal.

"Umur organisasi akan panjang kalau kita bisa beradaptasi, barang siapa di Jabar Bergerak yang pola pikirnya masih jadul maka setelah Covid-19 ini pasti ketinggalan," katanya.

Kan Emil menekankan agar Jabar Bergerak selalu

terus berinovasi. Apresiasi diberikan kepada Jabar Bergerak Kabupaten Cianjur sebagai terobosan inovasi di antara kabupaten/ kota lainnya.

Jabar Bergerak merupakan organisasi nirlaba yang beranggotakan para relawan dari berbagai profesi. Mereka telah berkomitmen untuk menjadi golongan yang memberi tanpa pujian dan bergerak tanpa harus menunggu perintah. "Maka tidak boleh ada anggota yang mencari nafkah di Jabar Bergerak," ucap Kang Emil.

Selain Rakerda, acara juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Jabar Bergerak 27 kabupaten/kota periode tahun 2020-2021. Pengukuhan diwakili Jabar Bergerak Kota Depok dan Kabupaten Majalengka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sisanya, ketua umum Jabar Bergerak Tantan Ahmad Santana mengukuhkan secara virtual.

Pada kesempatan tersebut, Kang Emil bersama Atalia Praratya Kamil juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Jabar Bergerak kabupaten/kota dalam Jabar Bergerak Award 2021. Adapun penghargaan diberikan kepada Jabar Bergerak Kota Cirebon untuk kategori Kolaborasi Terbaik, Kabupaten Cianjur untuk kategori Inovasi Terbaik, serta Kabupaten Bandung Barat untuk kategori Respons Terbaik. ● pur



IDN/ANTARA

PERSIAPAN SAMBUT RAMADAN

Remaja Masjid Al Wustho Mangkunegaran Solo mengikuti aksi bersih-bersih jelang bulan Ramadan di Solo, Jawa Tengah, Senin (12/4). Kegiatan bersih-bersih masjid yang dibangun pada masa Mangkunegara II dan dipugar pada 1878-1918 dengan arsitek Thomas Karsten tersebut untuk memberikan rasa nyaman bagi jamaah masjid saat ibadah bulan suci Ramadan sesuai protokol kesehatan.

Wali Kota Cilegon Beri Sinyal Mutasi Besar-besaran Pasca-Lebaran

CILEGON (IM) - Wali Kota Cilegon Hellyd Agustian beri sinyal mutasi besar-besaran pasca pelantikan Maman Mauludin sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon definitif, Senin (12/4).

Hal ini lantaran ketika Maman telah menjabat sebagai Sekda Kota Cilegon definitif, maka jabatan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) secara otomatis telah resmi dimiliki Maman. Rencana mutasi besar-besaran ini, dimungkinkan mulai digencarkan pasca-Idul Fitri 2021.

Hellyd mengatakan, tugas pertama yang diembankan oleh dirinya kepada Maman, yakni pembenahan kepegawaian. "Rotasi bagian atasnya kan sudah nih. Makanya, berikutnya adalah rotasi tingkat bawah. Ini yang akan kami diskusikan," kata Hellyd usai acara Pelantikan di Aula Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik (DKISS) Kota Cilegon, Senin (12/4).

Hellyd mengucapkan selamat kepada Maman sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekda Kota Cilegon yang sebelumnya selaku Penjabat (Pj) Sekda Kota Cilegon.

Pengangkatan Maman sebagai Sekda Kota Cilegon berdasarkan Pasal 162 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang.

Dalam regulasi tersebut, bahwa gubernur bupati dan wali kota yang akan melakukan pengantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dalam jangka waktu bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Menurut Hellyd, Pemkot Cilegon telah menempuh jalur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Diterbitkannya surat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 821 Tanggal 5 April Tahun 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Cilegon setelah sebelumnya dilakukan seleksi terbuka dan mendapatkan rekomendasi dari komisi ASN.

"Saya menganggap bahwa momentum ini penuh makna bernilai sejarah dan luar biasa. Karena selama menjabat sebagai Kepala BPKAD Kota Cilegon yang bersangkutan mempunyai tugas yang sangat luar biasa dengan membangun satu jabatan definitif dan 2 jabatan tambahan yaitu selaku Pj Sekda dan Pj Wali Kota Cilegon," tuturnya.

Sementara itu, Sekda Cilegon Maman Mauludin membenarkan adanya arahan dari wali kota. "Itu memang akan kami bahas. Karena banyak jabatan kosong," ucapnya. ● pur



IDN/ANTARA

KENDALA DISTRIBUSI BANTUAN KORBAN GEMPA MALANG

Anggota Palang Merah Indonesia (PMI) menata bantuan untuk korban gempa Malang yang belum didistribusikan di Posko Bantuan Gempa, Ampelgading, Malang, Jawa Timur, Senin (12/4). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat, luasnya wilayah terdampak gempa serta lokasi yang tersebar menjadi kendala pendistribusi bantuan.